

Dampak Kerja Sama Jepang-Filipina Terhadap Keamanan Maritim Jepang

Putri Dia Nina Sa'pang

Universitas Hasanuddin

Atika Puspita Marzaman

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: putridianina09@gmail.com

Abstract: *Japan and the Philippines are countries rich in history, culture, and natural wealth closely tied to the sea. Japan has engaged in maritime diplomacy with the Philippines in the realm of security. Maritime security cooperation between the two nations forms the foundation for collaboration in the management of marine resources, cultural exchanges, economics, and maritime security. The objective of this research is to examine the impacts that can result from Japan-Philippines cooperation on Japan's maritime security. This research employs a mixed-methodology to elucidate the scope and impacts stemming from Japan-Philippines cooperation on Japan's maritime security. The research findings demonstrate that the impact of Japan-Philippines cooperation on maritime security provides critical access and plays a vital role in strengthening regional security in the area. Success in achieving assured maritime security conditions has positive effects on Japan in various sectors, especially in the trade sector. This leads to an increase in trust and facilitates smooth trade activities in the maritime region due to guaranteed maritime security. This approach reflects Japan's commitment to being more proactive in upholding global maritime security and collaborating with its regional partners to achieve shared prosperity and peace in the region and the world.*

Keywords: *Diplomacy, Japan, Maritime, Security.*

Abstrak: Keamanan; Maritim Jepang dan Filipina negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang berkaitan erat dengan laut. Jepang menjalin kerja sama dengan Filipina melalui diplomasi maritim dalam bidang keamanan. Kerja sama keamanan maritim antara kedua negara membentuk dasar bagi kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya laut, pertukaran budaya, perekonomian, hingga keamanan maritim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dampak yang dapat dihasilkan dari kerja sama Jepang-Filipina terhadap keamanan maritim Jepang. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran untuk menjelaskan cakupan dan dampak yang ditimbulkan dari kerja sama Jepang-Filipina terhadap keamanan maritim Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kerja sama Jepang-Filipina terhadap keamanan maritim memberikan akses penting dan membawa fungsi penting dalam penguatan keamanan regional di kawasan. Keberhasilan dalam mencapai kondisi keamanan maritim yang terjamin membawa dampak positif bagi Jepang pada berbagai sektor, khususnya pada sektor perdagangan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan kepercayaan dan memungkinkan kegiatan perdagangan di wilayah perairan berjalan lancar karena keamanan maritim yang terjamin. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Jepang untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan maritim global dan berkolaborasi dengan mitra-mitra regionalnya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan perdamaian di kawasan dan di dunia.

Kata kunci: Diplomasi, Jepang, Keamanan, Maritim.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini mengkaji masalah terkait “Dampak Kerja Sama Jepang-Filipina terhadap Keamanan Maritim Jepang” ditinjau dari studi Kebijakan Maritim.

Jepang dan Filipina adalah dua negara maritim yang kaya akan sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang berkaitan erat dengan laut. Melintasi lautan yang luas, kemitraan Jepang dan Filipina membentuk dasar bagi kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya laut, pertukaran

budaya, perekonomian, hingga pada keamanan maritim. Kedua negara merepresentasikan warisan maritim yang kaya, diperkaya dengan berbagai tradisi nelayan, perkapalan, dan eksplorasi laut. Kehidupan di kawasan ini sangat berhubungan dengan laut, dan mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan pesat yang terjadi dalam perdagangan maritim menimbulkan banyak tantangan dan tanggung jawab bersama terkait pengelolaan sumber daya laut dan kelimpahan lingkungan laut. Jepang menyadari akan pentingnya laut bagi kesejahteraan negaranya, sehingga melakukan berbagai kerja sama untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Jepang tidak hanya memandang laut sebagai batas fisik antar negara tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan dan memperkaya hubungan bilateral. Melalui cara-cara yang diplomatis Jepang kemudian menjalin kemitraan dengan berbagai negara di dunia. Kerja sama bilateral yang dilakukan Jepang dan Filipina telah menjadi bagian integral dalam dinamika geopolitik Asia Pasifik. Sebagai bentuk konkret dari kesadaran akan pentingnya menjaga wilayah maritim yang dimiliki, Jepang kemudian melakukan diplomasi maritim dengan Filipina dalam bidang keamanan. Pada tahun 2012 dibidang pertahanan Jepang dan Filipina melakukan kerja sama keamanan maritim. Tahun 2013 Filipina dan Jepang menegaskan komitmen yang ada diantara mereka dengan melakukan kerja sama maritim lebih mendalam lewat pembahasan isu keamanan maritim guna merespon tindakan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Jepang meresmikan hubungan kerja sama maritim dengan Filipina ketika berada dibawah pemerintahan Shinzo Abe.

Melalui kerja sama keamanan maritim, keduanya berkomitmen untuk merawat dan memajukan kekayaan laut yang telah menjadi bagian tak terpisah dari identitas mereka. Jepang telah merancang strategi kemitraan untuk mengatasi tantangan keamanan di laut. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Jepang secara signifikan bergantung pada sumber daya maritim untuk membentuk jaminan keamanan dan stabilitas di wilayah maritimnya. Kesadaran yang muncul setelah telaah mendalam bahwa keamanan laut tidak hanya menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan prasyarat utama untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan bagi negara. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral di bidang keamanan maritim bukan hanya merupakan kebijakan strategis, tetapi juga merupakan respons bijak terhadap tantangan kompleks yang melibatkan aspek-aspek seperti perdagangan, transportasi, dan keamanan regional.

Adapun hal-hal yang dicakup dalam kerja sama keamanan maritim Jepang-Filipina, yaitu peningkatan kemampuan *coast guard* Filipina, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan peralatan komunikasi untuk keselamatan maritim, pembelian kapal multi-fungsi,

peningkatan stabilitas regional, latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, dan mengatasi ancaman keamanan maritim. Sebagian besar dari kerja sama ini telah berhasil dicapai dalam beberapa tahun belakangan.

Jepang menjadikan kerja sama yang dilakukannya dengan Filipina sebagai bentuk upaya perlindungan hubungan bilateral di kawasan dan sebagai upaya Jepang menghindarkan Filipina dari pengaruh regional Tiongkok. Jepang sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian tentunya akan menggunakan cara-cara yang diplomatis untuk kemudian menjalin relasi dan mempertahankan reputasi baiknya di mata publik internasional.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, menggunakan dua konsep untuk membahas secara mendalam terkait dampak dari kerja sama keamanan maritime Jepang-Filipina terhadap keamanan maritim Jepang. Konsep tersebut, ialah diplomasi maritime dan keamanan regional.

Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah upaya yang mencerminkan strategi diplomasi yang diterapkan oleh suatu negara yang wilayah lautnya dikategorikan cukup luas dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah maritimnya. Hal ini melibatkan rangkaian upaya diplomatis yang berfokus pada pemeliharaan stabilitas laut, peningkatan kerja sama regional, dan membangun citra sebagai poros maritim di panggung internasional. Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan dilakukan untuk menunjang terciptanya stabilitas keamanan di perairan. Diplomasi maritim dalam bidang keamanan seringkali disandingkan dengan diplomasi pertahanan, dimana tujuan dari diplomasi ini untuk menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional.

Dalam konteks diplomasi keamanan maritim, negara tidak hanya melakukan diplomasi untuk memastikan keamanan negaranya sendiri tetapi juga turut mengupayakan jaminan keamanan bagi negara-negara tetangganya agar tetap berada dalam wilayah perairan yang aman dan stabil. Diplomasi maritim ini mencakup pertukaran intelijen, patroli bersama, dan peningkatan kemampuan dalam merespon ancaman maritim (perompakan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas).

Menurut Christian Le Mière, diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui ranah maritim. Diplomasi maritim tidak hanya sebatas diplomasi yang dipergunakan untuk mengelola konflik dan ketegangan yang terjadi dalam permasalahan yang berkaitan dengan maritim melalui instrumen hukum internasional, tetapi diplomasi maritim juga mencakup pada penggunaan aset atau sumber daya di bidang maritim untuk mengatur

hubungan antara negara. Le Mière memperluas pemahaman dengan mengklasifikasikan bentuk diplomasi maritim, sebagai berikut:

- Diplomasi kooperatif, diplomasi yang berkaitan dengan kunjungan pelabuhan, latihan bersama atau operasi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana.
- Diplomasi persuasif, diplomasi ini berupaya untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim dan membangun citra positif bangsa di mata publik internasional.
- Diplomasi koersif, diplomasi yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dan pembangunan pertahanan dalam menjaga kedaulatan.

Keamanan Regional

Para dasarnya keamanan regional merupakan turunan dari keamanan nasional. Keamanan nasional diartikan sebagai terbebasnya ancaman-ancaman yang dapat membahayakan eksistensi (kelangsungan hidup) suatu negara. Mengacu pada hal tersebut, keamanan regional mencakup unsur-unsur mendasar yang harus dimiliki oleh negara, seperti integritas wilayah, kedaulatan, kebebasan memilih sistem politik, dan kondisi yang memadai untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Dalam melihat isu keamanan internasional dengan konteks regional, perlu memperhatikan dua bidang spesifik. *Pertama*, aspek eksternal keamanan nasional dimana hal ini menyangkut pembentukan dan pemeliharaan hubungan bilateral dan multilateral dengan peserta hubungan internasional lain di kawasan, misalnya negara lain, lembaga regional, aliansi militer, organisasi integrasi, dsb. *Kedua*, sistem internasional secara keseluruhan dalam hal ini mengacu pada apresiasi dan depresiasi terhadap pentingnya hubungan dan aktivitas regional dalam struktur, serta kedudukan negara dan wilayah yang memilikinya dalam sistem internasional.

Konsep keamanan regional telah ada lama dalam konteks hubungan internasional dan diartikan sebagai upaya melindungi hubungan satu sama lain serta rasa ketergantungan antar negara di suatu kawasan dari berbagai ancaman, termasuk ketidakstabilan, krisis, konflik bersenjata, dan perang regional. Secara umum, keamanan di tingkat regional biasanya dibangun melalui sistem atau aliansi yang beroperasi di wilayah tertentu.

“Lembaga keamanan regional seringkali dibentuk berdasarkan batas geografis wilayah tersebut, berfungsi sebagai penghubung untuk kerja sama antarnegara” meskipun ada beberapa kesempatan cakupan geografisnya dapat berubah karena adanya kepentingan fungsional seperti perdagangan. Lembaga keamanan regional, khususnya dalam pemerintahan militer, dapat mencakup wilayah lebih luas dari batas geografis atau ekonomi semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi campuran untuk menjelaskan cakupan dan dampak yang ditimbulkan dari kerja sama Jepang-Filipina terhadap keamanan maritim Jepang. Adapun studi literatur yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, publikasi ilmiah, berita, laporan pemerintah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas kepenulisan. Sumber daya sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dipergunakan untuk menjelaskan cakupan kerja sama Jepang-Filipina.

Selanjutnya, kita akan mengembangkan topik mengenai cakupan kerja sama antara Jepang dan Filipina, dan akan menggunakannya untuk menganalisis dampak yang timbul dari kerja sama tersebut. Data yang disajikan dalam konteks ini diperoleh melalui regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sektor maritim. Dengan demikian, setelah semua data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan, kita dapat menyusun kesimpulan yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada latar belakang yang telah diterakan sebelumnya, relasi yang terjalin antara Jepang dan Filipina telah ada sejak masa Perang Dunia I. Meski pada awalnya Jepang menggunakan Filipina sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perekonomian tetapi saat ini kedua negara telah saling bekerja sama dalam berbagai bidang. Filipina sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan posisi strategis karena menjadi jalur penghubung antara Asia Tenggara dan Pasifik. Kerja sama yang terjalin diantara dua negara dibina oleh Amerika Serikat.

Kerja sama Jepang-Filipina pada bidang keamanan maritim secara resmi terjalin ketika masa pemerintahan Shinzo Abe. Jepang telah mengalami berbagai perubahan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terjalannya kerja sama Jepang-Filipina menjadi salah satu bagian dari dinamika pertahanan dan keamanan Jepang. Kerja sama Jepang-Filipina telah terjalin dalam beberapa tahun belakangan. Lantas apakah dampak yang kemudian dapat dihasilkan dari kerja sama antara kedua negara ini akan diberikan penjelasan lebih lanjut dalam bagian ini.

1. Dinamika Pertahanan dan Keamanan Maritim Jepang

Pertahanan dan keamanan maritim Jepang telah mengalami perubahan signifikan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Kebijakan pertahanan Jepang didasarkan pada perjanjian kerja sama dan keamanan dengan Amerika Serikat tahun 1960, yang membatasi kemampuan militer Jepang. Konsep Pertahanan maritim Jepang mencakup perlindungan jalur laut dan pengembangan kemampuan pencegahan maritim guna mengatasi ancaman keamanan di

kawasan. Jepang telah berinvestasi dalam memodernisasi kemampuan maritim militernya, termasuk pengembangan kapal perang dan teknologi maritim, serta pendirian pangkalan militer. Ini termasuk pengembangan kapal rusak, kapal selam, dan kapal induk baru.

Dinamika pertahanan dan keamanan maritim di Jepang dibentuk oleh kombinasi pertimbangan strategis, komitmen aliansi, dan tantangan regional. Keamanan maritim telah menjadi isu yang semakin penting bagi Jepang karena berbagai faktor. Faktor-faktor ini termasuk meningkatnya insiden perompakan laut, peningkatan angkatan laut "blue water" dalam kekuatan-kekuatan yang sedang berkembang seperti India dan China, serta hostilitas antar-negara di wilayah seperti Laut China Selatan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan perlindungan jalur komunikasi laut vitalnya, Jepang telah mengambil beberapa langkah. Ini termasuk pergeseran Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar untuk meningkatkan kapasitas *coast guard* mereka.

Keterlibatan Jepang dalam berbagai bentuk kolaborasi keamanan maritim dengan negara lain, termasuk Filipina adalah upaya untuk mengatasi tantangan dan isu penting terkait keamanan maritim. Jepang yang bersungguh-sungguh dalam upayanya terhadap anti-pembajakan di Asia Tenggara menjadi bukti identitasnya sebagai negara maritim yang kapabel dalam melindungi keamanan maritim. Identitas sebagai negara maritim diperkuat dengan keunggulan dalam peralatan dan teknologi dibidang maritim yang dimiliki oleh Jepang. Hal ini dapat terlihat pada jet Gulfstream V jarak jauh dan kapal patroli dengan sistem pengendali tembakan canggih dan kemampuan penglihatan malam dengan penargetan canggih yang dimiliki Jepang sejak tahun 2005. Dimana negara-negara maritim di Asia Tenggara pada saat itu belum memiliki teknologi keamanan seperti milik Jepang. Jepang juga memiliki kapal patroli bersenjata dan platform pengawasan udara yang digunakan mengidentifikasi kapal-kapal mencurigakan yang melintas di perairan Jepang, dan mengancam kapal dagang yang tidak bersenjata agar tidak melakukan perdagangan ilegal di wilayah perairan Jepang.

Badan *coast guard* Jepang juga telah secara langsung mendukung kekuatan keamanan maritim regional melalui proyek-proyek pembangunan kapasitas penegakan hukum sejak tahun 1999. Selain itu, Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan meloloskan reformasi kebijakan pertahanan dan legislatif untuk memperkuat Angkatan Bela Diri Jepang dan berkontribusi secara aktif pada keamanan internasional. Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan Jepang akan kebutuhan pendekatan komprehensif terhadap pertahanan dan keamanan maritim, yang mencakup tidak hanya kemampuan militer tetapi juga kerja sama dengan mitra regional dan pengembangan otoritas *coast guard*. Upaya-upaya ini juga didukung oleh kemitraan dan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Aliansi Jepang-AS memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan keamanan maritim Jepang. Melalui pertukaran militer, perjanjian penggunaan fasilitas militer, dan latihan bersama, Jepang berusaha meningkatkan interoperabilitas dengan AS dan mengatasi kekhawatiran keamanan bersama di wilayah, terutama yang terkait dengan tindakan tegas China di Laut China Timur dan Selatan. Secara keseluruhan, dinamika pertahanan dan keamanan maritim di Jepang melibatkan kombinasi langkah seperti meningkatkan otoritas *coast guard*, memperkuat angkatan bela diri, dan berkerjasama dengan mitra regional dan Amerika Serikat.

2. Kerja sama Jepang-Filipina dalam Keamanan Maritim

Jepang merupakan negara yang terkenal sebagai negara yang menjaga perdamaian dunia. Mengingat peristiwa pasca Perang Dunia II terjadi dengan dilucutinya persenjataan milik Jepang oleh Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai negara yang tidak diperkenankan menggunakan persenjataan, dan pasukan militer miliknya dialihkan menjadi Pasukan Bela Diri atau *Self Defense Forces* (SDF). Jepang kemudian berkeinginan untuk memperbaiki diri dan berfokus untuk membangun kembali perekonomiannya yang sempat mengalami *collapse*. Jepang turut memperbaiki reputasi yang sempat rusak di mata publik internasional dengan gencar menjalin relasi dengan negara-negara tetangganya hingga pada negara diluar kawasannya. Jepang melakukan kerja sama di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Meskipun tidak diperkenankan untuk menggunakan persenjataan, namun itu tidak menjadikan Jepang acuh pada bidang pertahanannya tetapi kemudian ini menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh Jepang dikarenakan tekanan keamanan yang dirasakan oleh Jepang mengharuskan untuk memikirkan agar negaranya tidak mendapat penyerangan dari negara lain karena tidak mampu mengamankan wilayahnya.

Jepang memilih Filipina sebagai partner dalam keamanan maritim sebagai bentuk respon dari tindakan ilegal yang dilakukan Tiongkok pada Laut China Timur dan Selatan. Tiongkok mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di Laut China Timur yang dimana lokasi tersebut dekat dengan wilayah Jepang. Tindakan Tiongkok ini juga mengganggu aktivitas kapal-kapal Jepang yang berada di sekitar kepulauan Senkaku yang saat ini menjadi sengketa. Filipina pun saat ini turut bersengketa dengan Tiongkok terkait Laut China Selatan. Sehingga Jepang dan Filipina kemudian berkolaborasi untuk melawan Tiongkok.

Jepang dan Filipina sama-sama anggota Dialog Keamanan Segi Empat (Quad), bersama dengan Amerika Serikat dan India. Quad adalah dialog strategis yang bertujuan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang memiliki prinsip bebas dan terbuka. Quad diprakarsai pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dengan dukungan Perdana Menteri

Australia John Howard, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Wakil Presiden AS Dick Cheney. Tujuan utama Quad adalah untuk mengintensifkan kerja sama antara empat negara mitra – Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat – untuk merespon dan menentang pengaruh Tiongkok yang kian membesar di kawasan. Quad pada dasarnya adalah sebuah format untuk mengoordinasikan koalisi mitra yang “berpikiran sama” dengan tujuan menjaga tatanan regional yang ada. Quad bukanlah sebuah aliansi formal namun sebuah kelompok longgar yang semakin terlembaga dari waktu ke waktu. Quad berupaya menegakkan perdamaian dan kemakmuran serta memperkuat ketahanan demokrasi, berdasarkan nilai-nilai universal.

Tujuan utama Quad adalah untuk mengintensifkan kerja sama antara empat negara mitra untuk menentang pengaruh Tiongkok yang kian membesar di kawasan. Quad pada dasarnya adalah sebuah format untuk mengoordinasikan koalisi mitra yang “berpikiran sama” dengan tujuan menjaga tatanan regional yang ada. Quad telah mengadakan beberapa pertemuan dan pertemuan puncak sejak awal berdirinya, dengan pertemuan puncak formal pertama diadakan pada tahun 2021. Quad dipandang sebagai penyeimbang tindakan tegas Tiongkok di kawasan, dan Tiongkok memprotes bahwa kelompok tersebut mewakili upaya untuk membuat “NATO Asia”. Namun, anggota Quad mengatakan kelompok tersebut ditujukan untuk mengeratkan hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer antara keempat negara dan bukan merupakan aliansi militer.

Pada dasarnya kedua negara ini menjadi lebih mudah dalam menjalin kerja sama dikarenakan Jepang dan Filipina merupakan sekutu lama Amerika, sehingga angkatan bersenjata kedua negara telah lama terpapar dan berpeluang besar pada pengaruh praktik militer Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut hubungan kerja sama kedua negara menjadi lebih mudah terjalin. Keduanya bekerja sama untuk memperjuangkan keamanan regional mereka. Keyakinan Jepang bahwa hubungan keamanan yang lebih kuat dengan Filipina juga aliansi bilateral mereka dengan Amerika Serikat dapat membawa peningkatan pada pencegahan di Pasifik Barat.

Jepang menggunakan pembangunan ekonomi untuk dapat melakukan transfer teknologi dan peralatan pertahanan ke Filipina karena Jepang sampai saat ini masih menjadi negara yang dilarang untuk melakukan transfer senjata kepada negara-negara yang terkena embargo persenjataan. Pernyataan ini didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh sebab itu, Jepang kemudian menggunakan Program Bantuan Pembangunan Resmi yang telah dibuat oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang dimana badan ini secara tradisional membiayai pembangunan ekonomi luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, Jepang kemudian melakukan pembiayaan pembangunan sepuluh kapal patroli kelas Parola sepanjang 44 meter yang tidak bersenjata untuk *coast guard* Filipina yang dikirim pada rentan waktu 2016 dan 2018. Pendanaan pembangunan kapal patroli kelas baru sepanjang 97 meter dan menjalani uji coba laut pada tahun 2022 juga turut dilakukan oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang.

Filipina menjadi salah satu mitra keamanan alam bagi Jepang. Sesama negara maritim yang saat ini mengalami tekanan keamanan yang dilakukan Tiongkok di wilayah Laut China Timur dan Selatan semakin memperkuat alasan kerja sama yang terjalin diantara kedua negara. Jepang bekerja sama dengan Filipina dalam mengatasi masalah keamanan regional, mencegah aktivitas maritim ilegal, dan memperkuat penggunaan hukum internasional untuk menyelesaikan gangguan di kawasan regional. Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan oleh Jepang-Filipina ialah membahas isu-isu keamanan maritim yang mencakup peningkatan kemampuan *coast guard* Filipina, peningkatan kerja sama maritim, peningkatan stabilitas regional, peningkatan kemampuan pertahanan, dan mengatasi ancaman keamanan maritim. Kerja sama ini mencerminkan komitmen diantara kedua negara untuk membangun keamanan regional yang kokoh dan mendukung aturan hukum laut internasional. Melalui kerja sama ini, Jepang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas lebih luas di kawasan Asia Pasifik.

3. Dampak Kerja Sama Keamanan Maritim Jepang-Filipina

Dalam konteks dinamika keamanan maritim kawasan Asia Pasifik, diplomasi maritim digunakan sebagai alat untuk mencapai hubungan kerja sama antara Jepang dan Filipina. Terdapat berbagai dampak yang dihasilkan dari kolaborasi Jepang-Filipina, yang tidak hanya mengarah pada penguatan pertahanan dan keamanan maritim, tetapi juga memahami dimensi diplomatis yang memperkuat peran keduanya sebagai poros maritim di panggung internasional. Kesepakatan maritim antara Jepang dan Filipina meliputi kerja sama pertahanan, kerja sama bencana, kerja sama teknologi pertahanan, kerja sama trilateral, kerja sama patroli maritim, dan kerja sama militer. Semua perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik dan memperkuat hubungan antara kedua negara.

Kerja sama Jepang-Filipina dalam keamanan maritim telah memberikan sejumlah dampak yang signifikan pada beberapa aspek kritis. Hal ini dapat terlihat pada tingkat keamanan dan stabilitas wilayah perairan keduanya mengalami peningkatan. sejumlah pertukaran informasi intelijen telah dilakukan oleh Filipina dan Jepang terlihat pada operasi kontra-pembajakan dimana Jepang juga mendanai pembangunan stasiun radar dan suku cadang helikopter bagi Filipina. Melalui stasiun radar ini Jepang juga dapat memperkuat mekanisme

penyebaran dan publikasi informasi mengenai aktivitas zona abu-abu Tiongkok dan non-sekutu.

Seiring dengan pelanggaran pembatasan hukum terkait transfer teknologi pertahanan Jepang, pembatasan kerja sama keamanan Jepang juga turut dilonggarkan. Pada 2014, Jepang mengadopsi Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan yang menjadi angin segar bagi Jepang karena dapat melakukan transfer peralatan pertahanan dan keamanan dengan negara-negara asing dengan dalih bahwa kegiatan transfer teknologi militer ini adalah tindakan proaktif Jepang dalam menjaga perdamaian dunia. Transfer peralatan pertahanan ke Filipina diyakini oleh Jepang dapat membawa keuntungan bagi keamanan Jepang mengingat Filipina tidak terlibat dalam konflik internasional apapun atau melanggar perjanjian internasional atau resolusi PBB apapun.

Selanjutnya, pada 2015 kedua negara mengadakan pelatihan *coast guard* dan angkatan laut bersama-sama. Kegiatan pelatihan mencakup latihan anti-pembajakan dan tata cara penanganan “pertemuan yang tidak direncanakan di laut”. Di tahun yang sama Jepang dan Filipina membahas terkait relokasi tiga pesawat latih TC-90 yang telah pensiun dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang ke Filipina agar pesawat ini dapat digunakan kembali sebagai pesawat patroli maritim. Tahun 2014 Jepang mengirimkan kapal perang, kapal selam serang diesel-listrik *Oyashio* ke Filipina untuk meningkatkan kemampuan penanganan penangkapan ikan ilegal, perompakan, dan perdagangan manusia yang terjadi di Filipina. Kapal selam ini memungkinkan Filipina untuk melakukan patroli dan pengawasan di perairan mereka sehingga keamanan maritim di kawasan regional juga turut meningkat.

Pada tanggal 15 Maret 2016, Jepang dan Filipina menandatangani perjanjian kerja sama teknologi perlindungan yang mendorong transfer teknologi dan peralatan perlindungan antara keduanya. Dalam kerangka ini, pengiriman kapal patroli oleh Jepang ke Filipina menjadi wujud nyata dari bantuan untuk meningkatkan kemampuan pemantauan klaim maritim Filipina. Kemudian, melalui dialog yang telah dilangsungkan oleh Jepang dan Filipina pada tahun 2015, maka pada tahun 2017 pesawat TC-90 berhasil di transfer oleh Jepang ke Filipina secara gratis. Disusul dengan pemindahan surplus suku cadang dari Pasukan Bela Diri Darat Jepang ke Filipina sebagai bentuk perbaikan tujuh helikopter utilitas UH-1 yang dimilikinya. Adanya dialog terkait transfer teknologi menjadi jalan bagi Jepang untuk melakukan berbagai modernisasi militer dan perencanaan darurat, dari hal ini pula terjadi koordinasi aliansi multilateral yang lebih kuat.

Sementara itu, kapal perang yang lebih mumpuni tiba di Filipina, termasuk *Kaga* milik Jepang turut di datangkan ke Filipina. Kapal *Kaga* ini merupakan kapal induk ringan yang digunakan untuk mengangkut helikopter, namun kemudian dikirim ke Filipina sebagai

bagian dari armada empat kapal pada tahun 2018. Dari sinilah kemudian Jepang secara rutin mengunjungi Filipina dan semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan karena mampu memberikan bantuan besar dalam perkembangan pertahanan dan keamanan Filipina. Pada 2019 ketika Filipina masih dibawah pimpinan Rodrigo Duterte, Tiongkok masih menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di Filipina bahkan memberikan larangan tegas untuk tidak membeli perangkat keras Amerika ataupun sekutunya. Namun, pada 2019 dengan cepat memperoleh radar pengawasan udara Jepang bahkan tiga tahun setelahnya Jepang mengirim sistem radar J/FPS-3 ke Filipina.

Pada tahun 2022, Jepang dan Filipina menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan, yang memungkinkan pengerahan pasukan Jepang ke Filipina jika terjadi keadaan darurat. Perjanjian ini merupakan komponen dair inisiatif yang lebih besar untuk mengintensifkan kerja sama pertahanan bilateral antara kedua negara dan untuk memberikan respons yang lebih baik terhadap tantangan keamanan bersama, dengan mempertimbangkan peningkatan aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Timur.

Perjanjian tersebut disebut *Reciprocal Access Agreement (RAA)*, dan negosiasinya diawali di tahun 2022 dengan tujuan untuk menambah interoperabilitas. Jika ditandatangani secara resmi, ini akan menjadi RAA pertama di Jepang yang menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan yang ketiga bagi Jepang secara keseluruhan. Perjanjian serupa dengan Australia dan Inggris mulai berlaku awal tahun ini. RAA akan memungkinkan *Japan Self-Defense Forces (JSDF)* dan *Armed Forces of the Philippines (AFP)* untuk berlatih dan beroperasi di wilayah masing-masing. Selain RAA, Jepang juga setuju untuk memberi Filipina sistem radar pengawasan pantai dan peralatan lainnya di bawah kerangka *Official Security Assistance (OSA)* yang baru, yang diluncurkan Tokyo pada bulan April untuk menyediakan peralatan pertahanan dan pasokan lainnya kepada negara-negara yang berpikiran sama. negara-negara untuk meningkatkan kerja sama keamanan.

Kementerian Luar Negeri Jepang telah memilih Filipina, Malaysia, Bangladesh, dan Fiji sebagai penerima OSA untuk tahun fiskal 2023. Inisiatif yang lebih besar untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara Manila dan Tokyo, yang didukung oleh Amerika Serikat dan dibangun berdasarkan kerja sama ekonomi dan pertukaran lintas budaya selama bertahun-tahun, diwakili oleh perjanjian kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina.

Pada tanggal 9 Februari 2023, Jepang dan Filipina menandatangani pernyataan bersama yang mengukuhkan komitmen mereka terhadap keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Dalam langkah lebih lanjut untuk memperkuat hubungan pertahanan, pada tanggal yang sama, kedua negara juga menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan. Kesepakatan ini memungkinkan keduanya

bekerja sama dalam hal perlindungan maritim, mencakup patroli bersama, latihan bersama, serta akuisisi dan pengadaan aset Maritim. Masih berada di hari yang sama Jepang dan Filipina turut menandatangani perjanjian kerja sama bencana. Perjanjian ini memberikan landasan bagi kerja sama dalam pengurangan bencana dan operasi kemanusiaan, menunjukkan kesediaan bersama untuk menanggapi tantangan bencana alam. Dalam upaya untuk memperkuat keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat telah membentuk kerja sama trilateral. Langkah ini menegaskan kolaborasi antara negara ketiga untuk menjaga stabilitas dan keamanan perairan regional.

Kerja sama patroli maritim antara kapal Jepang dan Filipina menjadi landasan dalam memerangi kejahatan pembajakan dan penyanderaan ABK. Sementara itu, kerja sama militer antara kedua negara, yang melibatkan latihan bersama dan pengiriman bantuan militer, memberikan dimensi lebih pada hubungan pertahanan yang erat antara Jepang dan Filipina. Kerja sama yang dilakukan oleh Jepang berupa transfer teknologi pertahanan dan keamanan kepada Filipina menjadikan pertahanan militer dan penegakan hukum oleh Filipina di Laut China Selatan menjadi lebih kuat, serta mampu memberikan pertahanan pada keamanan maritim dan kebebasan laut. Dengan menggunakan pendekatan diplomasi dan dialog pertahanan, latihan bersama, pelatihan tenaga kerja, dan patroli dapat mendorong penyelesaian sengketa Laut China Timur dan Selatan dengan cara-cara damai. Investasi pada kemampuan teknologi dan infrastruktur angkatan bersenjata dapat membawa peningkatan bagi kapasitas militer dan lembaga penegak hukum sehingga dicapailah pengoperasian dan pemeliharaan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih maju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerja sama Jepang-Filipina dalam keamanan maritim memberikan akses penting dan membawa fungsi penting dalam penguatan keamanan regional di kawasan. Merespon tindakan ilegal Tiongkok pada Laut China Timur dan Selatan dengan melakukan penguatan pertahanan dan keamanan maritim merupakan cara yang dianggap paling efektif untuk melawan perilaku ilegal Tiongkok. Jepang telah menjalin kemitraan dengan Filipina sebagai langkah strategis untuk melindungi negara tersebut dari pengaruh regional dominan yang berasal dari Tiongkok. Jepang mengimplementasikan langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan melalui transfer teknologi pertahanan dan keamanan, serta langkah konkret lainnya dengan menggunakan diplomasi maritim.

Jepang meyakini pentingnya menciptakan lingkungan keamanan maritim yang stabil adalah kunci untuk memfasilitasi perdagangan di wilayah perairan dengan lancar, memelihara perdamaian regional, dan mencegah eskalasi konflik. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai

kondisi keamanan maritim yang terjamin membawa dampak positif pada berbagai sektor, terkhusus pada sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kepercayaan dan memungkinkan kegiatan perdagangan di wilayah perairan berjalan lancar karena keamanan maritim yang terjamin.

Dengan demikian, terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali di lautan, Jepang tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan bersama di tingkat regional. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Jepang untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan maritim global dan berkolaborasi dengan mitra-mitra regionalnya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan perdamaian di kawasan dan di dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan selama kepenulisan ini. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim, S.IP., MIRAP. selaku pengampu mata kuliah Studi Kebijakan Maritim serta Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA. atas bimbingan dan panduan yang berharga selama kepenulisan. Tak lupa kepada anggota mata kuliah Studi Kebijakan Maritim yang telah berbagi ide, wawasan, dan dukungan dalam proses kepenulisan ini. Penghargaan saya juga untuk keluarga yang menyediakan fasilitas, sumber daya, serta memberikan dukungan moral dan motivasi. Semua kontribusi ini telah memainkan peran penting dalam kelancaran penelitian ini, dan saya berterima kasih atas setiap bentuk dukungan yang diberikan..

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Agnieszka Kuzstal. (2017). *Theoretical foundations of regional security in international relations - the overview*. <https://doi.org/10.5604/17318157.1234845>
- Armed Clash in the South China Sea*. (2012). Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/report/armed-clash-south-china-sea>
- Bagus, I., Maheswara, G., Susanti, S., & Fasisaka, I. (n.d.). *Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/58550/34111/>
- Guillermo. (n.d.). *Japan's security engagement with the philippines - foreign policy Research Institute*. www.fpri.org. Retrieved October 20, 2023, from <https://www.fpri.org/article/2023/08/japans-security-engagement-with-the-philippines/>

Jepang dan Filipina memperdalam kerja sama pertahanan di tengah kekhawatiran keamanan bersama. (n.d.). Indo-Pacific Defense Forum. Retrieved October 20, 2023, from <https://ipdefenseforum.com/id/2023/09/jepang-dan-filipina-memperdalam-kerja-sama-pertahanan-di-tengah-kekhawatiran-keamanan-bersama/>

Mahesha, W. (n.d.). *Faktor Domestik dan Sistemik dari Perluasan Peran Militer Jepang Tahun 2014* [Review of *Faktor Domestik dan Sistemik dari Perluasan Peran Militer Jepang Tahun 2014*]. https://repository.unair.ac.id/87485/5/JURNAL_WIRASENA%20MAHESHA_071511233078.pdf

Poling, G. B., Natalegawa, A., & Fallin, D. (2023). Building a U.S.-Japan-Philippines Triad. www.csis.org; <https://www.csis.org/analysis/building-us-japan-philippines-triad>

Samuels, R. J. (2007). "New Fighting Power!" Japan's Growing Maritime Capabilities and East Asian Security. *International Security*, 32(3), 84–112. <https://www.jstor.org/stable/30130519>

Swastika, M. B. (2017). Latar Belakang Peran Aktif Jepang di Anti-Piracy Asia Tenggara dalam Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62114>

Welle, D. (2023, February 10). *Jepang dan Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Militer*. Dw.com; Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/jepang-dan-filipina-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-militer/a-64663059>

Windyaro Pramana Lahagu, & Tri Joko Waluyo. (2019). KEPENTINGAN JEPANG MELAKUKAN KERJASAMA BIDANG PERTAHANAN DALAM MALABAR EXERCISE DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDIA. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24413>

Buku Teks

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG DAN FILIPINA DALAM BIDANG KEAMANAN. (n.d.). <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17089/BAB%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Le Mière, C. (2015). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges* (G. Till, Ed.) [Review of *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*].

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENSE EQUIPMENT AND TECHNOLOGY. Retrieved October 2023, from <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000152490.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (n.d.). *Japan's Policies on the Control of Arms Exports* [Review of *Japan's Policies on the Control of Arms Exports*]. Retrieved October 2023, from <https://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/index.html>

(2014). The Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology [Review of *The Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology*]. In *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000152490.pdf>

(2022). First Japan-Philippines Foreign and Defense Ministerial Meeting (“2+2”) [Review of *First Japan-Philippines Foreign and Defense Ministerial Meeting (“2+2”)*]. In *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_003111.html

Artikel Surat Kabar/Majalah

Fraser, D. (2023). The Quad: A Backgrounder [Review of *The Quad: A Backgrounder*]. In *Asia Society Policy Institute*. Asia Society. <https://asiasociety.org/policy-institute/quad-backgrounder>

Hirose, T. (2014). Japan’s New Arms Export Principles: Strengthening U.S.-Japan Relations [Review of *Japan’s New Arms Export Principles: Strengthening U.S.-Japan Relations*]. In *Center for Strategic & International Studies*. Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/japans-new-arms-export-principles-strengthening-us-japan-relations>

The Guardian. (2022, May 24). *What is the Quad, and how did it come about?* The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/what-is-the-quad-and-how-did-it-come-about>